

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PENGUKURAN KINERJA (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG)

**Oleh :
Aprilia Puspitasari
115020301111008**

**Dosen Pembimbing :
Dr. Rosidi, SE., MM., Ak.**

ABSTRACT

Performance measurement for public's sector is very important to assess the accountability of the organization in providing public services to the community. Accountability must show the budget can be absorbed effectively, economically, efficiently and providing services that meet the needs of the community. In addition, as a public organization also needs to demonstrate good governance and transparency (good public governance). Performance measurement is a method or device used to record and assess the achievement of implementation activities based on the goals, objectives, and strategies of the organization, so it can be seen the progress in implementing the organization's performance. Moreover, it can improve the quality of decision making leaders of public organizations. This thesis aims to determine the implementation of performance measurement system at the local government that located at Jombang. Researchers used descriptive method qualitative and data that obtained primary data. The results showed that performance measurement is carried out by local governments Jombang using KPI (Key Performance Indicators). KPI selected from a set of performance indicators identified by criteria of a good indicator. Performance measurement system has been implemented from planning to evaluation realization success rate. Where the supporting data can to obtain from the Public Satisfaction Index report.

Keywords : *Performance Measurement, Key Performance Indicators, Public Satisfaction Index.*

ABSTRAK

Pengukuran kinerja bagi sektor publik sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Akuntabilitas harus menunjukkan bagaimana anggaran bisa terserap dengan efektif, ekonomis, dan efisien serta pemberian pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sebagai organisasi publik juga perlu menunjukkan pemerintahan yang bersih dan transparan (*good public governance*). Pengukuran kinerja merupakan metode atau alat yang digunakan untuk mencatat kemudian menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dalam melaksanakan kinerjanya. Selain itu dapat meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan pemimpin organisasi public. Skripsi ini bertujuan untuk

mengetahui implementasi sistem pengukuran kinerja pada pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh adalah data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jombang menggunakan IKU (Indikator Kinerja Utama). IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan kriteria indikator yang baik. Sistem pengukuran kinerja sudah diimplementasikan mulai dari perencanaan sampai evaluasi realisasi tingkat keberhasilan. Dimana data pendukung yang digunakan dapat diperoleh dari laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Kata Kunci : Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Indeks Kepuasan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pada era saat ini sering terjadi adanya *expectation gap* karena terdapat perbedaan antara harapan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah dengan apa yang telah dilakukan oleh para pengelola dan pejabat pemerintahan. Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan reformasi di segala bidang. Salah satu usaha memulihkan kondisi ini adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Upaya ini juga didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sendiri sebagai lembaga eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif, dan juga oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memunculkan jenis akuntabilitas baru, sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan pengukuran kinerja ini akan terlihat seberapa jauh keberhasilan kinerja yang telah dicapai dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini dirasa sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan public yang efektif dan efisien. Akuntabilitas tidak hanya sekedar menunjukkan bagaimana dana public dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Keharusan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan memiliki akuntabilitas mendorong para aparatur pemerintah Kabupaten Jombang untuk bisa mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih yang disebut dengan *Good Public Governance* dan bisa memberi kepuasan pelayanan publik untuk masyarakat. Pengukuran kinerja pemerintahan Kabupaten Jombang dilakukan berdasarkan Permenpan Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007. Namun saat ini pengukuran kinerja masih dipandang sebelah mata dan lebih mementingkan penilaian keuangan. Sehingga pengukuran kinerja yang sudah dilakukan sampai saat ini perlu ditinjau kembali pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan, maka penulis tertarik untuk lebih mengetahui sejauh mana implementasi sistem pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, judul yang digunakan oleh penulis adalah : “ Analisis Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja”.

TINJAUAN PUSTAKA

Organisasi Sektor Publik

Definisi Organisasi Sektor Publik menurut Mahsun (2006 : 16) adalah organisasi *non profit* (tidak mengutamakan laba) dan perusahaan swasta adalah *profit oriented* (mengutamakan laba). Sektor publik menggunakan kriteria keberhasilan dengan 3E yakni ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Sedangkan sektor swasta menggunakan laba. Pertanggungjawaban sektor publik yakni kepada masyarakat dan parlemen (DPR/ DPRD). Tetapi untuk sektor swasta pertanggungjawabannya kepada pemegang saham atau kreditur.

Sistem Pengendalian Manajemen Organisasi Sektor Publik

(Anthony dan Govindarajan : 2005) menyatakan bahwa suatu sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitive untuk melaksanakan suatu aktivitas kelompok. Pengendalian manajemen merupakan proses dimana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi (Anthony & Govindarajan, 2005: 8). Pentingnya sistem pengendalian manajemen dilaksanakan oleh organisasi karena sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Sistem pengendalian yang baik berpengaruh pada cara manapun tujuannya; artinya tindakan-tindakan individu untuk meraih tujuan-tujuan pribadinya juga akan membantu dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi (Anthony & govindarajan, 2002: 55). Dengan adanya suatu sistem itu pula berbagai ragam aktivitas dapat terkoordinir dan terarah menuju satu tujuan bersama.

Pengukuran Kinerja

Definisi Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi (Mahsun 2006:25). Dalam konteks organisasi sector public, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan public. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sector public melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan public yang relative murah dan berkualitas. Tujuan pengukuran kinerja sektor publik adalah sebagai berikut :

- 1) Mengeahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
- 2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
- 3) Memperbaiki kinerja periode – periode berikutnya
- 4) Memotivasi pegawai
- 5) Menciptakan akuntabilitas publik
- 6) Memberikan pertimbangan yang sistematis

Elemen Pengukuran Kinerja

Elemen pokok pengukuran kinerja menurut Mahsun (2006 : 24) antara lain sebagai berikut :

- 1) Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi
- 2) Merumuskan indikator dan ukuran kinerja

Manfaat Pengukuran Kinerja

Beberapa manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal organisasi maupun eksternal organisasi (BPKP,2000) yakni sebagai berikut :

- 1) Memastikan bahwa tujuan organisasi yang telah disepakati telah tercapai.
- 2) Memastikan pemahaman para pelaksana terhadap ukuran apa yang akan digunakan.
- 3) Menjadi alat komunikasi antara pimpinan dan bawahan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
- 4) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja serta membandingkannya dengan RENJA (Rencana Kinerja) dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerjanya.
- 5) Memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- 6) Membantu dalam memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- 7) Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.
- 8) Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- 9) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
- 10) Menunjukkan peningkatan yang perlu diadakan.

Indikator Kinerja

Indicator kinerja menurut BPKP (2000) merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja antara lain langsung, obyektif, cukup, kuantitatif, terinci, praktis, dan dapat diyakini. Sedangkan karakteristik untuk kinerja yang baik menurut Mahmudi (2007:149) adalah indikator itu harus konsisten, dapat diperbandingkan, jelas, dapat dikontrol, kontingensi, komprehensif, focus, relevan, dan realistis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:13) metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Nazir (2005:57) studi kasus adalah suatu penelitian tentang subyek penelitian yang berkenaan dengan fase spesifik dari keseluruhan personalitas.

Obyek penelitian lebih difokuskan pada Daerah Kabupaten Jombang yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi sistem pengukuran kinerja Daerah Kabupaten Jombang. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dari sumber primer.

Sumber data primer menurut Sugiyono (2012:225) adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh penulis melalui wawancara. Jenis data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini yang diperoleh secara langsung melalui bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Sumber data nya adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2013, RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, dan Laporan Akhir Kajian Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2013, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2013. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara
2. Dokumentasi

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendiskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis Kesesuaian Sistem Pengukuran Kinerja dengan Peraturan Perundang – undangan.
- b. Menganalisis LAKIP dan Capaian Kinerja, meliputi : (1) menganalisis LAKIP terutama untuk target kinerja dan realisasinya. (2) menganalisis laporan Kepuasan Masyarakat. (3) menganalisis LPKJ Tahun 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Sistem Pengukuran Kinerja berdasarkan Perundang - Undangan

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN) Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja ini digunakan untuk mengetahui kinerja suatu instansi atau organisasi. Penggunaan IKU dalam pengukuran kinerja Sekretariat Daerah sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mengetahui keberhasilan maupun kegagalan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, program maupun kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan, baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), maupun jangka pendek (RKPD). Selain itu juga sebagai bahan dan acuan dalam penyusunan perencanaan pada periode yang akan datang. Indikator pengukuran yang digunakan adalah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah maupun IKU SKPD.

Penyusunan Indikator Kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang telah menerapkan langkah penyusunan indikator kinerja sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimulai dengan menetapkan rencana strategis yakni visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program dan anggaran. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipilih sebagai ukuran keberhasilan. Menurut PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 yang dimaksud dengan indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penyusunan indikator dilakukan melalui tahap sebagai berikut :

- 1) Pengkajian beragam dokumen yang relevan, seperti :
- 2) Dari hasil kajian kemudian disusun Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya, Kepala Daerah (Bupati) menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah. Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah maupun SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah juga membutuhkan kecermatan agar Indikator Kinerja Utama memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas sesuai tugas dan fungsi.
- 3) Pengesahan Indikator Kinerja Utama oleh Kepala Daerah (Bupati).

Analisis LAKIP dan Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja utama diperoleh nilai – nilai yang meliputi target, realisasi, dan prosentase nilai capaian tingkat keberhasilan. Pada analisis LAKIP dibatasi ruang lingkup meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah. Pengukuran pada LAKIP didasarkan pada indikator kinerja utama.

Analisis Pengukuran Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

- a. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah. Indikator meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan

- pemerintah daerah yang sarasannya meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan bahwa realisasi untuk badan, dinas, dan kecamatan hasilnya sedikit dibawah prosentase target. Walaupun tidak mencapai target tetapi jika dilihat dari prosentase capaian, rata – rata capaiannya yakni 96% dengan tingkat keberhasilan “sangat berhasil”. Dengan hasil yang demikian maka tingkat pencapaian sasaran yang diperoleh adalah 95,48% dengan tingkat keberhasilan “sangat berhasil”.
- b. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan salah satunya yang adalah realisasi target capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan sebesar 80%. Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa realisasinya sebesar 112.15%. Angka ini jelas melebihi target yang ditetapkan. Maka dengan demikian prosentase capaiannya sebesar 140.19% dengan tingkat keberhasilan “sangat berhasil”. Secara keseluruhan tingkat pencapaian untuk meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan adalah sebesar 130,50% dengan tingkat keberhasilan “sangat berhasil”.
 - c. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana pemerintahan daerah ditargetkan meningkat 70% kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan daerah yang pada tahun 2013. Realisasinya diatas target yakni sebesar 87.31% dengan prosentase capaian sebesar 124.73% dan dikategorikan tingkat keberhasilannya “sangat berhasil”. Dengan demikian tingkat pencapaian untuk sasaran ini yakni sebesar 124,73% dan tingkat keberhasilannya “sangat berhasil”.
 - d. Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah ditargetkan sebesar 70% aparatur memiliki kinerja dengan kriteria baik. Realisasinya ternyata di atas 70% yakni sebesar 99,86%. Dengan realisasi sebesar 99,86% maka prosentase capaian yang diperoleh ada sebesar 142,66% dengan tingkat keberhasilan “sangat berhasil”.
 - e. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Realisasi yang melebihi target yakni pada jumlah organisasi yang dilakukan analisa jabatan dengan capaian sebesar 100% dan tingkat keberhasilan “sangat berhasil”. Selain itu, jumlah sosialisasi hukum kepada masyarakat juga mencapai 100% dengan tingkat keberhasilan “sangat berhasil”. Untuk jumlah perda yang diterbitkan hanya mencapai tingkat keberhasilan “berhasil” karena realisasi sebesar 12% maka capaiannya hanya sebesar 80%. Tetapi untuk penyelesaian hukum yang dihadapi oleh pemerintah masih kurang tingkat keberhasilannya. Prosentase capaian hanya sebesar 50%.

Analisis Laporan Kajian Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Untuk mendukung hasil dari pengukuran capaian kinerja dilakukan penyusunan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KEPMENPAN) Nomor KEP/25/MENPAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah realisasi capaian hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2012 terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2013 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1**Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2012 dan 2013**

Unit Pelayanan	2012			2013		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1. Badan Daerah	78,10	74,24	95,06	78,52	76,00	96,79
2. Dinas Daerah	78,47	78,52	100,06	78,10	75,62	96,82
3. Kecamatan	76,33	77,01	100,89	77,01	74,41	96,62
Rata-rata	75,34	76,26	101,32	77,88	75,34	96,75

Sumber data : LAKIP Kabupaten Jombang Tahun 2013

Indikator “Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Setiap Tahun” dihitung dengan membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2013 sebesar 96,75% dengan Capaian Kinerja Tahun 2012 sebesar 101,32, sehingga Capaian Indikator “Indikator “Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Setiap Tahun” adalah sebesar **95,48%** atau dengan kriteria **Sangat Berhasil**.

Analisis Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Untuk membandingkan ketersediaan anggaran dan kinerjanya dilakukan analisis pencapaian pengukuran kinerja. Analisis ini juga sebagai bahan penilaian atas kinerja instansi pemerintah dan sebagai penilaian kinerja pegawai. Analisis pencapaian pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Daerah kepada DPRD, berdasarkan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berikut adalah pencapaian pengukuran kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan :

A. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah.

Pencapaian meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah dapat dilihat misalnya saja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.028.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 3.552.289.207,00 atau 88,19 %. Pemerintah Kabupaten Jombang juga telah melayani administrasi mutasi kependudukan bagi penduduk yang memerlukan perubahan data kependudukan (lahir, mati, pindah dan datang). Realisasi pelayanan mutasi kependudukan di tahun 2013 sebanyak 23.835 orang. Dengan demikian pencapaian pengukuran kinerja untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah tercapai dengan baik.

Analisis Kinerja Berdasarkan Efektivitas

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan

keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Sondang P. Siagian 2001:24). Analisis kinerja berdasarkan efektivitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi sistem pengukuran kinerja yang ada pada Pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Dikatakan efektif apabila anggaran dan kegiatan dapat terserap dengan maksimal. Ketika anggaran dikeluarkan untuk suatu kegiatan atau program, maka realisasinya harus menunjukkan keterserapan anggaran itu sepenuhnya untuk kegiatan atau program yang telah dianggarkan, contohnya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah.

Untuk mengetahui efektivitas ketercapaiannya, maka dapat dibandingkan antara realisasi jumlah lembar pelayanan KTP dan Kartu Keluarga (KK) dengan realisasi pelayanan KTP dan Kartu Keluarga (KK) sebagai berikut :

Tabel 4.2

Contoh Pengukuran Efektivitas Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja pada Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jenis Pelayanan (Satuan : Lembar)		Jumlah Pelayanan (Satuan : Pelayanan)		Formula	Penghitungan
KTP	50.224	KTP	114.234	$\frac{\sum \text{Lembar KTP dan KK}}{\sum \text{Pelayanan KTP dan KK}} \times 100$	$\frac{110.964}{114.234} \times 100 = 97,14 \%$
KK	60.740	KK			
Jumlah	110.964	Jumlah	114.234		“Sangat Berhasil”

Sumber data : Olahan dari LAKIP dan LKPJ Kabupaten Jombang Tahun 2013

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh baik dari LAKIP maupun LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, didapatkan hasil bahwa perbandingan antara realisasi pemberian pelayanan KTP dan Kartu Keluarga (KK) sejumlah 110.964 lembar yang diberikan kepada masyarakat dengan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang terealisasi sebesar 114.234 pelayanan untuk KTP dan Kartu Keluarga. Dari perhitungan diperoleh tingkat ketercapaian sebesar 97,14% dengan kriteria keberhasilan “Sangat Berhasil”. Prosentase ketercapaian menunjukkan bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang sudah efektif, dimana pemberian pelayanan untuk KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang diberikan hampir sesuai dengan pemberian jumlah lembar KTP dan Kartu Keluarga (KK) kepada masyarakat. Untuk itu ketercapaian meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah sudah efektif sesuai dengan pengukuran indikator kinerja utama yang dilakukan, misalnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait pemberian pelayanan KTP dan Kartu Keluarga (KK).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diuraikan pada bagian sebelumnya, disimpulkan bahwa sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah Kabupaten Jombang telah diimplementasikan berdasarkan Permenpan Nomor PER/9/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). Dimana IKU sudah diimplementasikan dengan tingkat keberhasilan “Sangat Berhasil” dengan presentase capaian rata – rata diatas 80%. Implementasi sistem pengukuran kinerja daerah Kabupaten Jombang sudah berjalan dengan efektif. Sebagai contoh pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Analisis berdasarkan efektivitas menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki prosentase 97,14% dengan kriteria keberhasilan “sangat berhasil” untuk indikator pelayanan KTP dan Kartu Keluarga (KK) baik lembar yang diberikan maupun pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Dikatakan efektif dimana pencapaian target sudah dapat direalisasikan walaupun belum 100%. Keterserapan anggaran juga sudah tercapai dengan baik dengan prosentase sebesar 88,19%. Dengan demikian ketersediaan anggaran terhadap pelayanan yang telah diberikan realisasinya sudah mendekati target yang telah ditetapkan. Perbandingan realisasi indikator kinerjanya rata – rata melebihi target. Walaupun dalam pelaksanaan pengukuran kinerja juga ditemukan kendala tetapi kendala ini bersifat klasik. Sampai saat ini kendala tersebut bisa diantisipasi dengan cara melakukan sosialisasi dan menyamakan persepsi tentang peraturan perundang – undangan yang ada. Selain itu untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan publik, pemerintah juga melakukan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor KEP/25/MENPAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Dengan pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ini dapat diketahui tingkat kekurangan dan kelemahan kualitas pelayanan, yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan untuk perbaikan pelayanan waktu mendatang, serta sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang hanya bersifat membantu, yakni sebagai berikut :

1. Diharapkan data – data yang mendukung untuk penilaian kinerja adalah data – data yang akurat. Supaya tidak terjadi kekeliruan dalam menganalisis data.
2. Diharapkan pada setiap periodenya Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dapat mengetahui hasil kinerja dengan melakukan pengukuran kinerja secara rutin dan melakukan pelaporan dengan tepat waktu.
3. Adanya LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang secara periodiknya tidak bisa diselesaikan pelaporannya secara tepat waktu, maka diharapkan pemicu yang menghambat proses penyusunan LAKIP ini dapat diselesaikan dengan baik untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. *Keputusan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor KEP/25/MENPAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.*
- _____. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah Kabupaten Jombang tahun 2013.*
- _____. *Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2013 Daerah Kabupaten Jombang.*
- _____. *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun 2013 Daerah Kabupaten Jombang.*
- _____. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor : PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.*
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.*
- _____. *Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*
- _____. *Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*
- Anthony, R. N. dan Vijay Govindarajan. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat. Jakarta.
- BPKP. 2000. *Pengukuran Kinerja Suatu Tinjauan pada Instansi Pemerintah*. Jakarta: BPKP.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN,. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Moh. Nazir. Ph.D , 2005, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Siagian, Sondang P, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan ketujuh, Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung : Alfabeta.